

Edisi 03/XI/2026

GAGASAN GENERASI MUDA UNTUK BANGSA

Suara komunitas muda Ruang Gagasan tentang isu ekonomi, sosial, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

GAGASAN GENERASI MUDA UNTUK BANGSA

Suara komunitas muda Ruang Gagasan
tentang isu ekonomi, sosial, lingkungan,
dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

GAGASAN GENERASI MUDA UNTUK BANGSA

Suara komunitas muda Ruang Gagasan
tentang isu ekonomi, sosial, lingkungan,
dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

PENGARAH	Hendri Saparini Hadi Rahman
PENYUNTING	Muh. Afdhal Mubarak AS
PENULIS	Fitri Yana Huzni Mubarok
PENULIS PENDAMPING	Raditya Akhdan N. Alia Fatika Santosa
DESAIN & TATALETAK	Nando Purnama Aji Faza Ghafara Basuki Daffa Ulhaq Irianto

14 x 21 CM | 54 Halaman

Cetakan Pertama, November 2026

Diterbitkan Oleh:

CORE Indonesia

Admin Ruang Gagasan

+62 822-6108-3712



RUANG GAGASAN

Daftar Isi

Daftar Isi I
Ruang Gagasan & Komunitas Muda Yang Bersuara II
Halo, Sobat Ruang Gagasan IV

BAGIAN 1
Ketika Selat Hormuz Tertutup, Seberapa Rentan
Pasokan Energi Indonesia? 1
Isu Pemicu: Perang Terbuka di Teluk Menutup Selat Hormuz 2
Harga Minyak, Rupiah, dan Stok Energi Tertekan 3
Siapa Saja Pihak yang Terdampak 4
Tiga Lapis Ketahanan Energi sebagai Solusi 5
Rekomendasi 6
Untuk Kawan Penggerak Energi Bersih 7

BAGIAN 2
Pendidikan untuk Siapa? Tiga Wajah Ketimpangan
Kebijakan Pendidikan Indonesia 9
Pemicu Wacana Penutupan Program Studi yang Meledak di Publik 10
Lulusan Baru dan Kebutuhan Riil Prodi 11
Alokasi Anggaran Pendidikan 2026 12
Pihak yang Paling Terdampak 13
Tiga Lapis Pembenahan Pendidikan sebagai Solusi 14
Kesimpulan dan Rekomendasi 15
Terima Kasih telah Bersuara untuk Pendidikan 16

BAGIAN 3
Potret Pasar Kerja Indonesia bagi Lulusan Baru
dan Pekerja Mid-Career 17
Realitas Pasar Kerja: Masuk Susah, Bertahan pun Sulit 18
Kondisi Pekerja Indonesia Saat Ini 19
Dari Siap Kerja Menuju Pasar Kerja yang Menyerap 20
Kesimpulan 21
Rekomendasi 22
Bersama Membaca Pasar Kerja Anak Muda 23

BAGIAN 4
Anak Muda Bersuara: Menyuarakan Gagasan Anak Muda
Melalui Komunitas 25
3 Tahun Menghimpun Gagasan 26
Pengembangan Komunitas sebagai Penjaring Suara Anak Muda 27
Kesimpulan dan Rumusan Masalah 28
Rekomendasi 29
Terima Kasih telah Tumbuh Bersama 30

BAGIAN 5
81 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Sebuah Refleksi
Kebijakan Sosial-Ekonomi 31
81 Tahun Merdeka, Kerentanan Tak Banyak Bergeser 32
Kerja Ada, Namun Kepastian Tidak 33
Pihak Paling Terdampak 34
Menjawab Akar Kerentanan 35
Rekomendasi 36
Bersama Merefleksikan 81 Tahun Merdeka 37

BAGIAN 6
Inovasi Besar dari Pemerintahan Terkecil: Belajar
dari RT 08/RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur 39
Inovasi Lokal di Tengah Beban Krisis Sampah Nasional 40
RT 08 Malaka Jaya: Lahan Sempit, Inovasi Tetap Tumbuh 41
Solusi yang Dipetakan: Dari Satu Gang ke Banyak Daerah Lainnya 42
Kesimpulan dan Rekomendasi 43
Belajar dari Gang Malaka Jaya 44

Penutup 45
Baca Edisi Sebelumnya 46

Ruang Gagasan

Ruang Gagasan merupakan forum diskusi yang menghimpun pemikiran dan gagasan dari beragam elemen anak muda. Forum ini lahir dari rangkaian Youth Economic Summit 2023 dan digelar secara rutin di Gedung CORE Indonesia, Tebet, Jakarta Selatan, serta di berbagai lokasi lainnya. Peserta yang terlibat berasal dari komunitas maupun perseorangan dengan latar belakang pelajar, mahasiswa, BUMN, birokrat, akademisi, pengusaha, hingga profesional.

Sejak 2024, Ruang Gagasan telah menggelar lebih dari 20 forum dengan mengangkat isu strategis di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti bonus demografi, ekonomi gig, wirausaha muda, darurat sampah, ekonomi sirkular, transisi energi, pendidikan, dan pasar kerja. Selain diskusi di forum, Ruang Gagasan juga melakukan kunjungan lapangan, antara lain ke TPST di Banyumas, Universitas Jenderal Soedirman, dan RT 08/RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Diskusi berlangsung secara interaktif melalui diskusi kelompok, lokakarya, dan bermain peran dalam suasana yang santai dan setara.

Hasil diskusi dirumuskan menjadi rekomendasi dan dibukukan. Buku Ruang Gagasan diserahkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Youth Economic Summit 2024 dan kepada Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan dalam Youth Economic Summit 2025. Pada 2026, gagasan peserta juga disuarakan melalui tulisan opini yang dipublikasikan kepada publik.

Komunitas Muda yang Bersuara

Ruang Gagasan telah diikuti oleh lebih dari 500 anak muda sejak 2024. Keberagaman latar belakang peserta memperkaya sudut pandang dalam setiap diskusi. Mahasiswa membawa pertanyaan dan kegelisahan generasinya, ASN muda membawa perspektif implementasi kebijakan, pegawai BUMN dan pengusaha muda membawa pengalaman praktis, sedangkan akademisi memberikan landasan riset.

Forum ini terbuka bagi siapa pun yang muda dan berpikiran inklusif, tanpa membawa kepentingan politik. Pada 2026, Ruang Gagasan menggandeng komunitas anak muda sebagai kolaborator agar suara yang terhimpun datang dari lintas disiplin, lintas profesi, dan lintas gerakan.

Halo, Sobat Ruang Gagasan

Buku ini berisi rangkuman obrolan Ruang Gagasan bersama teman-teman muda sepanjang 2026. Topiknya dekat dengan keseharian anak muda, mulai dari harga minyak dunia yang melonjak gara-gara perang di Timur Tengah, ramainya wacana penutupan program studi, dan susahnya mencari kerja setelah lulus, sampai refleksi 81 tahun merdeka. Ada juga cerita warga di sebuah gang sempit di Jakarta Timur yang mengolah sampahnya sendiri.

Setiap edisi dibuka dengan data dari pemantik, lalu dibahas bareng peserta dalam suasana yang santai. Dari obrolan itu lahir banyak pandangan dan usulan yang kemudian dirapikan menjadi rekomendasi di setiap bagian buku ini.

Sepanjang tahun ini, Ruang Gagasan jalan bareng banyak komunitas anak muda. Mereka ikut menentukan tema, mengajak teman-teman datang, dan meramaikan diskusi, sehingga obrolannya terasa lebih dekat dengan apa yang benar-benar dialami generasi muda.

Isi buku ini tentu belum mewakili semua anak muda Indonesia. Harapannya, buku ini bisa menjadi bacaan yang berguna, baik untuk teman-teman muda maupun para pengambil kebijakan. Kalau setelah membaca kamu jadi ingin ikut ngobrol, pintu Ruang Gagasan selalu terbuka.

Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, bertemu, berbagi, dan bekerja sama sepanjang 2026. Selamat membaca.

Atas partisipasi seluruh pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 07 November 2026

RUANG GAGASAN

Ruang Gagasan

Bagian 1

Ketika Selat Hormuz Tertutup, Seberapa Rentan Pasokan Energi Indonesia?

Halo Sobat Ruang Gagasan, tahu nggak kenapa Ruang Gagasan perlu membedah dampak penutupan Selat Hormuz ini bareng kamu?

Dampak Konflik Global dan Kerentanan Domestik: Energi. Diskusi ini mengulas dampak eskalasi konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia, khususnya melalui gejolak harga minyak, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta ketahanan pasokan BBM dan LPG.

Format Acara
Pemaparan data oleh pemantik, dilanjutkan diskusi interaktif dengan peserta

Gedung CORE Indonesia
Cafe Tenku Lt.4
Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.76A, Jakarta Selatan, Indonesia







Pemantik Acara:
Dipo Satria Ramli
Ekonom CORE Indonesia



Pemaparan data oleh pemantik, dilanjutkan diskusi interaktif dengan peserta

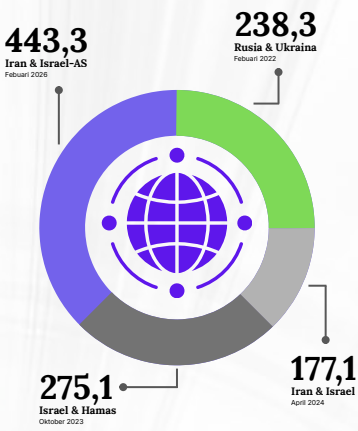
Isu Pemicu: Perang Terbuka di Teluk Menutup Selat Hormuz

Perang langsung Iran melawan Israel dan Amerika Serikat pecah pada 28 Februari 2026 dan membuat Selat Hormuz praktis tertutup bagi pelayaran. Padahal, selat ini mengalirkan 20,9 juta barel minyak per hari, setara 20% konsumsi dunia, dan 89% di antaranya menuju Asia. Indeks Risiko Geopolitik melonjak ke 443,3 poin pada hari kedua perang, tertinggi dibandingkan konflik besar lain pascapandemi.

> ***Gambar 1*** *membandingkan tingkat reaksi dunia terhadap empat perang pascapandemi menggunakan data Indeks Risiko Geopolitik dari Caldara dan Iacoviello yang mengukur porsi artikel media internasional tentang ancaman perang dan teror. Perbandingan dilakukan dengan menetapkan nilai pada tujuh hari sebelum perang (t-7) menjadi 100 dan melihat lonjakannya pada hari kedua perang (t+2).*

Hasilnya menunjukkan bahwa perang tahun 2026 merupakan konflik yang paling mengguncang dengan lonjakan tertinggi mencapai 443,3 poin (sekitar 4,4 kali lipat dari kondisi sepekan sebelumnya), jauh melampaui konflik lainnya seperti Israel–Hamas dan Rusia–Ukraina.

Gambar 1. Indeks risiko geopolitik pada beberapa perang langsung pascapandemi

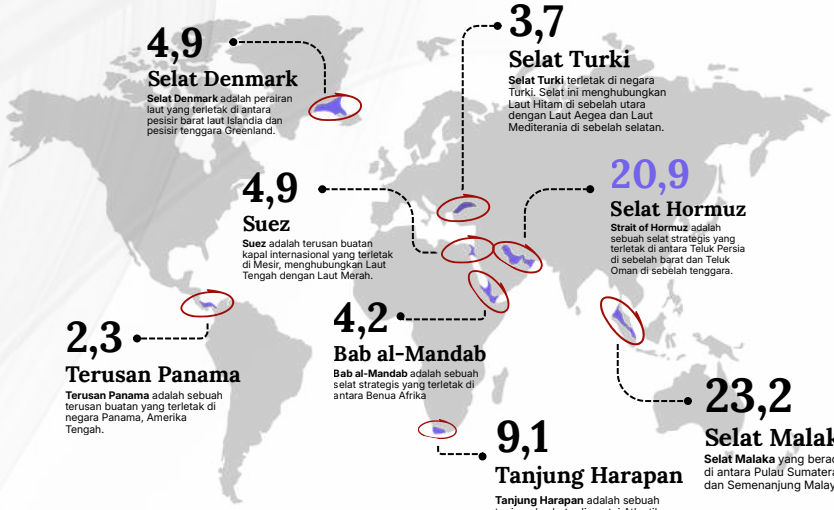


Sumber: BRI, diolah dari *Geopolitical Risk Index*.
Catatan: t adalah hari saat perang langsung dimulai.

Jalur Minyak Melalui Jalur Strategis Dunia

Semester I 2025 (juta barel/hari)

Hormuz mengalirkan 20,9 juta barel per hari, setara 20% konsumsi minyak dunia, dan 89% di antaranya menuju Asia, tanpa rute pengganti.



Gambar 2. Jalur Minyak Dunia
Sumber: *EIA, World Oil Transit Chokepoints*.

Seperti Apa sih dampaknya? Harga Minyak, Rupiah dan Stok Energi Tertekan

- **Harga Minyak:** Brent melonjak 93% dalam satu kuartal, dari US$61 menjadi US$118 per barel pada 31 Maret 2026.
- **Impor:** impor minyak mentah naik menjadi 135,33 juta barel pada 2025, dengan porsi kawasan Teluk sekitar 20–25%.
- **Rupiah:** kurs menyentuh rekor Rp17.305 per dolar AS pada 23 April 2026.
- **Stok Energi:** per 31 Maret 2026, stok Pertamax, Pertamax Turbo, dan LPG berada di bawah batas minimum.
- **Pupuk:** kawasan Teluk menguasai 36% ekspor urea dunia.

Gambar 3. Sumber impor minyak mentah Indonesia, 2025 (ribu barel per hari)

Sumber Impor Minyak Mentah Indonesia, 2025

Ribu Barel Per Hari

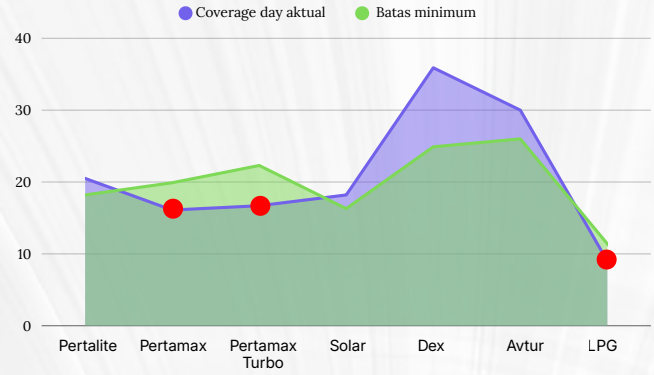


Gambar ini menggambarkan sumber impor minyak mentah Indonesia tahun 2025 yang didominasi dari Nigeria, Angola, dan Arab Saudi, walau sumber pasokannya bukan dari negara sumber konflik namun penentuan harga minyak dari negara tersebut tetap dihargai mengikuti Brent yang ikut melonjak saat Hormuz terganggu.

Sumber: Kementerian ESDM (volume) dan BPS melalui Katadata (komposisi negara), diolah. Total impor 353,1 ribu barel per hari.

Coverage days BBM dan LPG vs Batas Minimum

31 Maret 2026 (hari)



Sumber: PT Pertamina Patra Niaga, status 31 Maret 2026, diolah.
Coverage days adalah jumlah hari konsumsi yang dapat dipenuhi stok.

Setiap produk pada gambar diatas memiliki dua garis. Garis pertama adalah *coverage days* aktual, yaitu jumlah hari konsumsi yang masih dapat dipenuhi stok pada 31 Maret 2026, dihitung dari stok nasional dibagi rata-rata penyaluran harian. Garis kedua yang berwarna hijau adalah batas minimum yang ditetapkan untuk produk tersebut. **Selama garis pertama lebih tinggi daripada batang hijau, stok masih aman, dan warnanya tidak terdapat titik merah**. Batang berubah merah ketika stok jatuh di bawah batas minimum, yaitu pada Pertamax, Pertamax Turbo, dan LPG.

Catatan: Angka antarproduk tidak bisa dibandingkan langsung karena ambangnya berbeda. Pertamina Dex dengan 35,86 hari terlihat paling tinggi, tetapi batas minimumnya juga tinggi, sedangkan LPG dengan 9,01 hari sudah berada di zona rawan meskipun angkanya tampak tidak jauh dari Pertamax.

Siapa saja pihak yang terdampak?

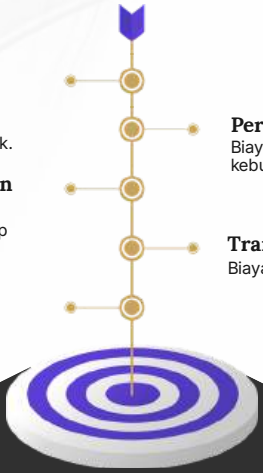
Pemerintah:
Beban subsidi dan kompensasi energi di APBN membengkak.

Rumah tangga dan usaha mikro:
Stok LPG hanya cukup sekitar sembilan hari.

Petani
Harga pupuk berisiko melonjak.

Pertamina:
Biaya pengadaan dan kebutuhan valas meningkat.

Transportasi dan logistik:
Biaya solar dan avtur naik.



Rumusan Masalah

Apa yang bisa dilakukan jika untuk menjaga pasok BBM dan LPG di indonesia, sekaligus meredam tekanan harga minyak dan rupiah terhadap APBN dan daya beli, ketika jalur pasokan energi utama dunia terganggu?

Tiga Lapis Ketahanan Energi Sebagai Solusi

Solusi diarahkan pada tiga lapis ketahanan energi, yaitu cadangan fisik, diversifikasi pasokan, dan bantalan fiskal–moneter, dengan pembagian peran yang jelas antaraktor.

- **Cadangan penyangga:** menambah stok di atas batas operasional dengan prioritas LPG dan Pertamax sesuai kekurangan pada Gambar 5. Alternatifnya adalah sewa tangki atau penyimpanan terapung.
- **Diversifikasi pasokan:** memperluas kontrak dengan pemasok non-Teluk dan meningkatkan fleksibilitas kilang untuk mengolah beragam jenis minyak mentah, sehingga pasokan tidak bergantung pada satu jalur.
- **Bantalan fiskal–moneter:** menyiapkan skenario APBN untuk harga minyak di atas US$100 per barel dan memperluas lindung nilai valas.
- **Pengendalian konsumsi:** memastikan BBM dan LPG bersubsidi tepat sasaran.
- **Peran aktor:** Kementerian ESDM menetapkan kebijakan cadangan, Pertamina mengeksekusi pengadaan dan penyimpanan, BPH Migas mengawasi distribusi, Kementerian Keuangan menyiapkan bantalan APBN, Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah, serta Kementan dan Pupuk Indonesia mengamankan pasokan pupuk.

Kesimpulan

Perang langsung Iran melawan Israel dan Amerika Serikat memicu guncangan geopolitik terbesar pascapandemi dan menutup Selat Hormuz, jalur sekitar 20% konsumsi minyak dunia. Bagi Indonesia sebagai importir neto minyak, guncangan ini masuk melalui tiga kanal sekaligus.

US$188

Harga minyak yang sempat menembus US$118 per barel.

Rp17.305

Rupiah yang melemah hingga rekor Rp17.305 per dolar AS.

Pertamax, Pertamax Turbo, LPG

Stok Pertamax, Pertamax Turbo, dan LPG yang jatuh di bawah batas minimum pada akhir Maret 2026. Penurunan stok yang terjadi hanya dalam dua setengah minggu menunjukkan betapa tipisnya bantalan pasokan saat ini.

Diversifikasi impor ke Afrika memang mengurangi paparan fisik, tetapi tidak melindungi dari lonjakan harga. Benang merahnya jelas: ketahanan energi tidak cukup diukur dari volume impor, tetapi dari kedalaman cadangan, keragaman sumber, dan kesiapan bantalan fiskal serta moneter. Tanpa penguatan ketiganya, guncangan berikutnya akan kembali merambat ke APBN, daya beli masyarakat, dan harga pangan.

Rekomendasi

- **Pertamina dan Kementerian ESDM:**
  Segera menambah sekitar 62 ribu MT LPG dan 100 ribu kL Pertamax series agar stok kembali ke batas minimum.
- **Kementerian ESDM:**
  Menerbitkan aturan cadangan penyangga energi dengan target coverage days di atas batas operasional.
- **BPH Migas:**
  Memublikasikan coverage days harian dan menetapkan pemicu tindakan ketika stok mendekati batas minimum.
- **Pertamina:**
  Mengunci kontrak jangka menengah LPG dan minyak mentah untuk periode 6–12 bulan dari pemasok di luar kawasan Teluk.
- **Kementerian Keuangan:**
  Menyusun uji sensitivitas APBN pada harga minyak US$100–120 per barel dan menyiapkan pos cadangan risiko energi.
- **Bank Indonesia:**
  Menyediakan fasilitas lindung nilai valas khusus bagi Pertamina dan importir energi.
- **BPH Migas dan Pertamina:**
  Memperketat verifikasi pembeli Pertalite dan LPG 3 kg.
- **Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia:**
  Mengamankan stok pupuk menjelang musim tanam dan memantau harga gas sebagai bahan baku pupuk.

KOLABORATOR RUANG GAGASAN EDISI APRIL 2026

Untuk Kawan Penggerak Energi Bersih

Ruang Gagasan edisi April 2026, **“Ketika Selat Hormuz Tertutup, Seberapa Rentan Pasokan Energi Indonesia?”**, terasa lebih kaya berkat teman-teman komunitas yang sehari-hari bergerak di isu energi bersih dan lingkungan. Sudut pandang energi terbarukan yang mereka bawa membantu peserta melihat jalan keluar dari ketergantungan pada minyak impor. Terima kasih atas kontribusi dan kerja samanya dalam mengawal tema ketahanan energi bersama Ruang Gagasan.

Mitra Komunitas:

Generasi Energi Bersih

cleanomic

SRE UPN “Veteran” Jakarta

SRE Universitas Negeri Jakarta

Bagian 2

Pendidikan untuk Siapa?

Tiga Wajah Ketimpangan Kebijakan Pendidikan Indonesia

Halo Sobat Ruang Gagasan, pernah ragu apakah jurusan yang kamu pilih masih berguna nanti?

Akhir April lalu, wacana penutupan program studi membuat keraguan itu makin menjadi. Padahal akar masalahnya bukan di daftar jurusan, melainkan di pasar kerja, anggaran, dan nasib para pengajar. Yuk, kita bedah satu per satu di edisi ini.

Kontroversi penutupan program studi yang meledak pada akhir April 2026 menunjukkan ketidakjelasan arah kebijakan pendidikan nasional. Pada saat yang sama, pengangguran lulusan perguruan tinggi menembus satu juta orang, guru honorer digaji di bawah Rp400 ribu per bulan, dan anggaran pendidikan 20 persen banyak terserap program di luar inti pembelajaran.

Pemaparan oleh pemantik, dilanjutkan diskusi interaktif dengan peserta

Gedung CORE Indonesia
Cafe Tenku Lt.4
Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.76A, Jakarta Selatan, Indonesia







Pemantik Acara:

Dhitta Puti Sarasvati
Direktur Eksekutif Barisan Pengkaji Pendidikan (Bajik)

Achmad Hanif Imanuddin
Peneliti CORE Indonesia



Pemaparan oleh pemantik, dilanjutkan diskusi interaktif dengan peserta

Pemicu Wacana Penutupan Program Studi yang Meledak di Publik

Pada 23 April 2026,
Badri Munir Sukoco Menyatakan

“Pemerintah akan memilah dan, kalau perlu, menutup program studi yang kurang relevan.”

Badri Munir Sukoco
Sekjen Kemdiktisaintek



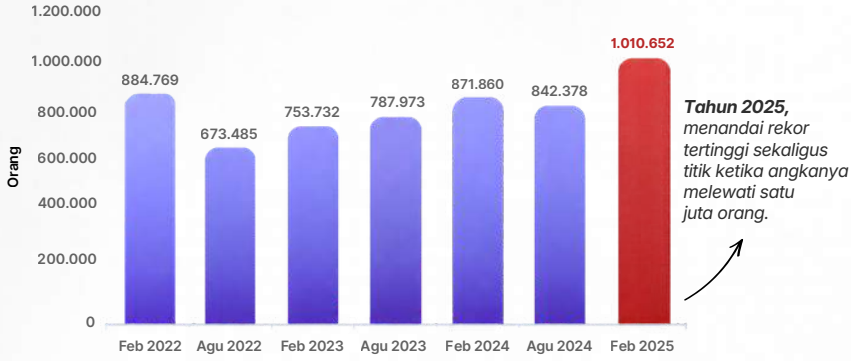
Enam hari kemudian,
Brian Yuliarto Menegaskan

“Penutupan program studi bukanlah pilihan utama. Penutupan hanya menjadi opsi terakhir"

Brian Yuliarto
Menteri Pendidikan

Jumlah Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi
(Februari 2022 - Februari 2025)

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, melalui Dataloka



Gambar ini menunjukkan kegelisahan di baliknya.

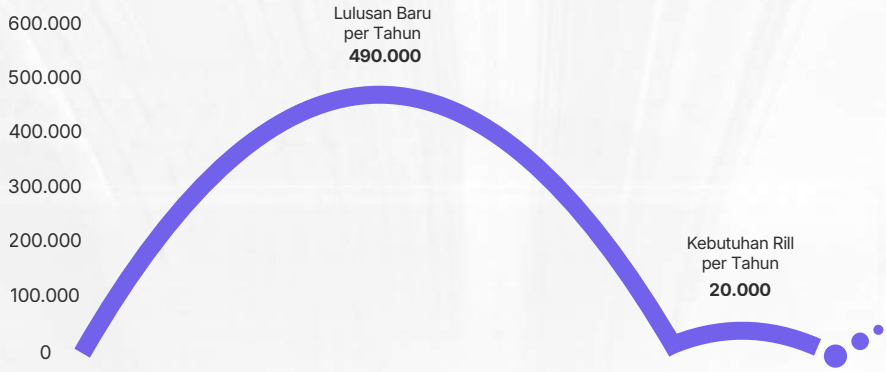
Pengangguran lulusan perguruan tinggi menembus 1.010.652 orang pada Februari 2025, rekor sejak 2022

Pengangguran angkanya naik dari 884.769 orang pada Februari 2022 menjadi 1.010.652 orang pada Februari 2025, atau tumbuh sekitar 14 persen dalam tiga tahun.

Lulusan Baru dan Kebutuhan Riil Prodi Pendidikan Guru Per Tahun

(orang)

Sumber: BAJIK, paparan diskusi 21 Mei 2026.



Gambar ini memperlihatkan ketimpangan paling ekstrem.

490.000 lulusan baru pendidikan guru per tahun berbanding kebutuhan 20.000 posisi.

Menandai kelebihan pasokan sebesar 24,5 kali kebutuhan. Angka ini juga menjelaskan mengapa rumpun pendidikan yang memiliki jumlah program studi terbanyak di PDDikti menjadi sorotan pertama dalam wacana penutupan program studi.

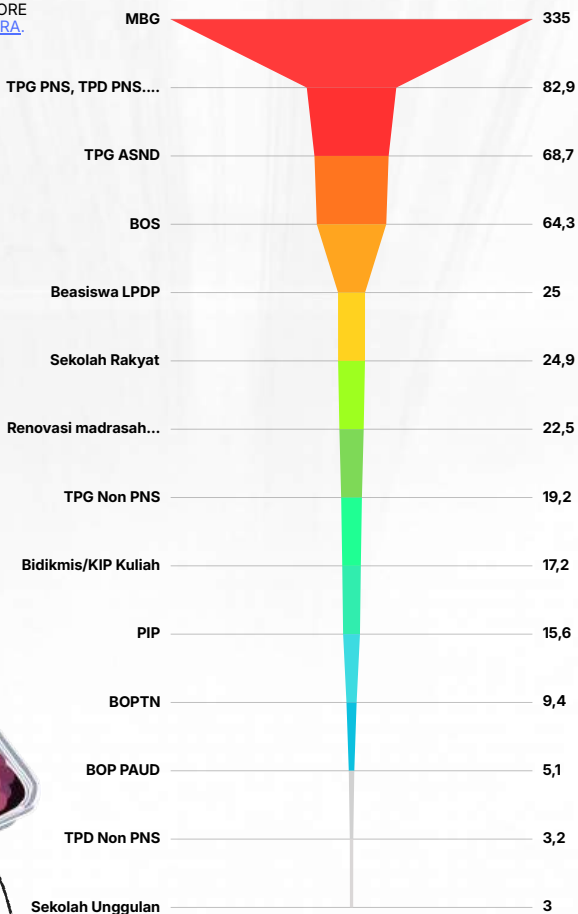
Data Pendukung: Pasar Kerja, Anggaran, dan Kesejahteraan Pendidik

- **Pasar kerja:** pekerja yang putus asa mencari kerja naik 11 persen menjadi 1,87 juta orang.
- **Anggaran:** anggaran pendidikan 2026 Rp757,8 triliun, 44 persen untuk MBG, lalu dipangkas menjadi Rp268 triliun, sehingga makin memperberat persoalan pendidikan.
- **Kesejahteraan pendidik:** ada guru honorer bergaji Rp223 ribu per bulan, dan tunjangan dosen stagnan sejak 2007.
- **Mutu dasar:** skor PISA 2022 turun di tiga bidang: matematika 366, membaca 359, sains 383.

Alokasi Anggaran Pendidikan 2026 menurut pos belanja

(Triliun rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah CORE Indonesia. Pembanding: Tempo dan ANTARA.





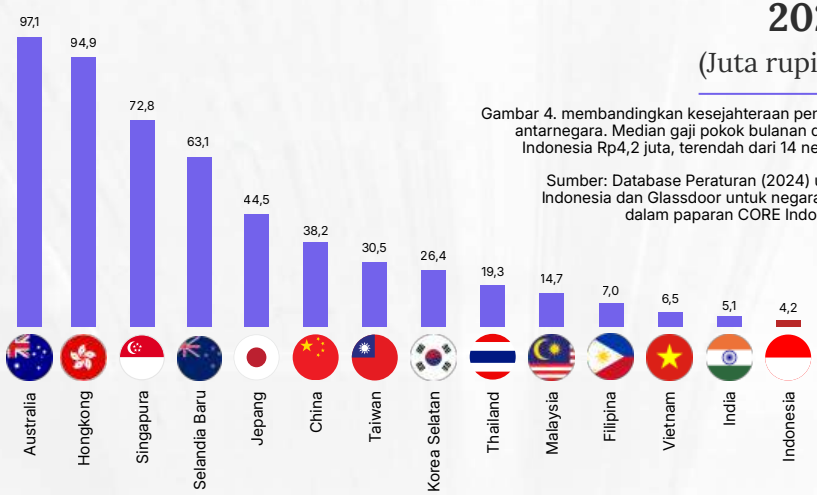
MBG (Makan Bergizi Gratis)

yang merupakan program kesehatan dan perlindungan sosial, telah memakan 44,2% anggaran pendidikan sehingga makin memperberat persoalan pendidikan.

Gambar ini menjelaskan paradoks anggaran. MBG menyerap Rp335 triliun pada pagu awal 2026, empat kali pos gaji dan tunjangan pendidik PNS.

Median gaji pokok bulanan dosen, 2025

(Juta rupiah)



Gambar 4. membandingkan kesejahteraan pendidik antarnegara. Median gaji pokok bulanan dosen Indonesia Rp4,2 juta, terendah dari 14 negara.

Sumber: Database Peraturan (2024) untuk Indonesia dan Glassdoor untuk negara lain, dalam paparan CORE Indonesia

Seluruh angka sudah dikonversi ke juta rupiah per bulan agar setara dibandingkan, dan yang dibandingkan adalah gaji pokok, bukan total pendapatan termasuk tunjangan atau penghasilan tambahan. Indonesia berwarna merah karena berada di posisi terendah. Angka ini perlu dibaca dengan hati-hati karena biaya hidup antarnegara berbeda, tetapi jarak dengan negara tetangga terlalu lebar untuk dijelaskan oleh perbedaan biaya hidup saja.

Siapa Pihak yang Paling Terdampak?

- **Mahasiswa sosial-humaniora:** pilihan studi menyempit.
- **Perguruan tinggi di luar papan atas:** menampung mahasiswa berpondasi lemah, lalu dinilai bermutu rendah.
- **Guru honorer dan dosen:** kesejahteraan tertinggal.
- **Lulusan baru:** bersaing di pasar kerja yang belum menyerap.
- **Siswa pendidikan dasar:** fondasi literasi dan numerasi rapuh.

Rumusan Masalah

Dari peta dampak tersebut, persoalan intinya dapat dirumuskan dalam satu pertanyaan. Bagaimana membenahi pendidikan nasional ketika pasar kerja belum menyerap lulusan, fondasi belajar rapuh, dan anggaran belum diarahkan ke inti pembelajaran?

Tiga Lapis Pembenahan Pendidikan Sebagai Solusi

Pertanyaan itu menuntun pembahasan pada tiga lapis pembenahan. Solusi diarahkan pada tiga lapis pembenahan, yaitu relevansi kurikulum, alokasi anggaran, dan mutu pengajaran.



Basis data kebutuhan program studi:
Memetakan program studi sesuai kebutuhan tenaga kerja sebelum memutuskan penutupan, seperti penggabungan 760 program studi humaniora di Korea Selatan.



Definisi belanja pendidikan yang lebih tegas:
memastikan porsi terbesar anggaran mengalir ke pembelajaran, kesejahteraan pendidik, dan sarana.



Kesejahteraan disertai akuntabilitas:
Kenaikan gaji perlu diikuti perbaikan kehadiran dan mutu pengajaran, karena kenaikan gaji saja terbukti tidak memperbaiki hasil belajar siswa.



Akhiri dikotomi STEM dan sosial-humaniora:
Keterampilan masa depan tumbuh dari perpaduan kompetensi teknis dan pemahaman manusia.



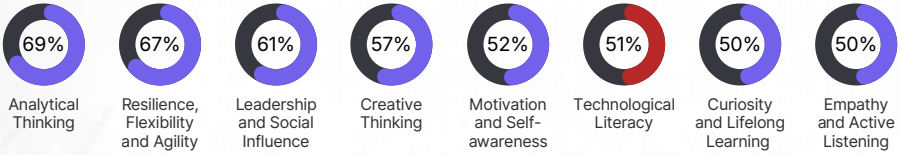
Peran aktor:
Kemdiktisaintek menata data dan mutu program studi, Kemendikdasmen memperkuat fondasi literasi dan numerasi, Kementerian Keuangan menertibkan definisi belanja pendidikan, serta perguruan tinggi membenahi proses pengajaran.

Arah tersebut bukan sekadar normatif, sebab kebutuhan dunia kerja menunjukkan pola yang sama.

Keterampilan Inti Paling dibutuhkan dunia kerja, 2025

(% Pemberi Kerja)

Sumber: World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025, dalam paparan CORE Indonesia.



Literasi teknologi diberi warna merah tua karena menjadi fokus pembahasan, yaitu satu-satunya keterampilan teknis di delapan besar dan posisinya berada di bawah berpikir analitis, ketangguhan, serta kepemimpinan. Artinya, keterampilan yang paling dicari tidak melekat pada satu rumpun ilmu tertentu dan dapat tumbuh di bidang apa pun jika cara pengajarannya tepat.

Dengan arah itu, seluruh temuan dapat dirangkum dalam satu benang merah.

Kesimpulan

Persoalan pendidikan Indonesia tidak terletak pada banyak atau sedikitnya program studi, juga bukan pada pilihan antara STEM dan sosial-humaniora. Masalah yang lebih mendasar adalah ketidakseimbangan antara sistem pendidikan dan pasar kerja, mutu pembelajaran yang belum memadai, serta anggaran besar yang belum sepenuhnya berorientasi pada inti pendidikan. Menutup program studi tanpa membenahi ketiganya berisiko hanya memindahkan masalah kepada mahasiswa dan perguruan tinggi. Pendidikan perlu dibangun dengan cara yang lebih berbasis data, adaptif terhadap perubahan dunia kerja, dan tetap menjaga keberagaman keilmuan. Pemerintah perlu memastikan anggaran benar-benar memperkuat kualitas belajar, menaikkan kesejahteraan pendidik sekaligus akuntabilitasnya, serta mempertemukan kompetensi teknis dengan kemampuan berpikir kritis. Pada akhirnya, yang perlu disesuaikan bukan hanya program studi, melainkan seluruh ekosistem pendidikan agar mampu membentuk manusia yang relevan bagi masa depan tanpa kehilangan fungsi dasarnya sebagai fondasi pembangunan manusia. Tanpa itu, penutupan program studi hanya akan mengulang pola lama, yaitu membebankan kegagalan sistem kepada individu.

Rekomendasi

- **Bangun basis data kebutuhan program studi sebelum bicara penutupan:**
  pemerintah memetakan kebutuhan tenaga kerja dan prospek kerja tiap bidang studi secara berkala, sehingga keputusan berpijak pada data, bukan asumsi relevansi industri.
- **Perjelas definisi anggaran pendidikan 20 persen:**
  kerangka regulasi menegaskan komponen yang boleh dibiayai, agar porsi terbesar diarahkan pada pembelajaran, pendidik, serta sarana dan prasarana.
- **Naikkan kesejahteraan guru dan dosen sekaligus perkuat akuntabilitas:**
  kenaikan pendapatan berjalan bersama pemantauan kehadiran, evaluasi kinerja, dan pelatihan berkelanjutan.
- **Investasi pada literasi dan numerasi sejak pendidikan dasar:**
  memperkuat fondasi membaca, memahami informasi, dan berhitung, karena kemampuan ini menentukan keberhasilan pada jenjang berikutnya sekaligus kesiapan menghadapi dunia kerja.
- **Hentikan dikotomi STEM versus sosial-humaniora:**
  kebijakan beasiswa dan kurikulum mendorong kombinasi kompetensi teknis, analitis, dan sosial, bukan mengunggulkan satu rumpun ilmu di atas yang lain.

KOLABORATOR RUANG GAGASAN EDISI MEI 2026

Terima Kasih telah Bersuara untuk Pendidikan

Kajian dan pengalaman teman-teman komunitas membuat diskusi Ruang Gagasan edisi Mei 2026, **“Pendidikan untuk Siapa? Tiga Wajah Ketimpangan Kebijakan Pendidikan Indonesia”**, terasa lebih konkret, mulai dari soal program studi dan anggaran sampai nasib guru dan dosen. Terima kasih atas kontribusi dan kerja samanya dalam membedah tema pendidikan di edisi ini.

Mitra Komunitas:

SRE UPN “Veteran” Jakarta

BAJIK Barisan Pengkaji Pendidikan

Bagian 3

Potret Pasar Kerja Indonesia Bagi Lulusan Baru dan Pekerja *Mid-Career*

Halo Sobat Ruang Gagasan, pernah lihat antrean job fair yang mengular sampai ada peserta pingsan?

Anehnya, statistik resmi justru menunjukkan pengangguran turun. Yang menganggur pun bukan mereka yang putus sekolah, melainkan lulusan SMA, SMK, dan universitas. Jadi, benarkah anak muda yang kurang berusaha? Simak selengkapnya dalam edisi ini, dan temukan sendiri jawabannya.

Format Acara

Diskusi kelompok kecil dalam dua kelompok. Pemantik membuka wawasan lewat paparan ringan dan interaktif, dilanjutkan diskusi berfasilitator di tiap kelompok, lalu presentasi hasil dan tanya jawab. Pendekatan ini dirancang agar peserta merumuskan sendiri gagasan dan rekomendasi kebijakan.

Gedung CORE Indonesia
CORESight Hub Lt. 1
Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.76A, Jakarta Selatan, Indonesia







Pemantik Acara:

Rafiq Rizki Prabowo
Deputy Chief Project Officer
Youth Ranger Indonesia

Azhar Syahida
Strategic Research
Assistant Manager (CORE Indonesia)



Pemaparan data oleh pemantik, dilanjutkan diskusi interaktif dengan peserta

Realitas Pasar Kerja: Masuk Susah, Bertahan pun Sulit

Sebuah job fair di Cikarang diserbu lebih dari 25.000 pencari kerja hingga sejumlah pelamar pingsan. Pada saat yang sama, survei hampir 1.000 manajer perekrutan menemukan satu dari enam perusahaan ragu merekrut Gen Z.

Tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,68 persen pada Februari 2026, setara 7,24 juta orang.

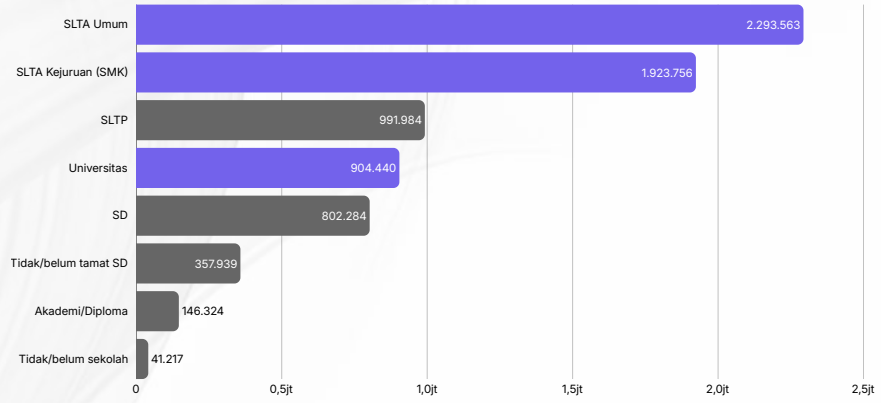
Catatan: Tingkat pengangguran terbuka adalah porsi angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja, bukan jumlah orang yang menganggur. Penurunan ini perlu dibaca hati-hati karena seseorang yang bekerja satu jam dalam seminggu sudah dihitung bekerja, sehingga pekerja informal, pekerja paruh waktu, dan setengah penganggur tidak muncul sebagai pengangguran. Itulah sebabnya angka 4,68 persen bisa terlihat baik sementara keluhan sulit mendapat kerja formal tetap meluas.

Angka agregat tersebut menutupi satu hal penting, yaitu siapa yang sebenarnya paling banyak menganggur?

Pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi, Agustus 2025

(orang)

Sumber: BPS, Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dalam paparan Youth Ranger Indonesia



Gambar ini memperlihatkan tren yang tampak membaik.

Dari 7,46 juta pengangguran terbuka, lulusan SLTA umum dan SMK menyumbang lebih dari 4,2 juta orang, dan universitas 904.440 orang.

Tiga kelompok berwarna Ungu, yaitu SLTA umum, SMK, dan universitas, karena justru kelompok terdidik inilah yang mendominasi pengangguran.

Jika yang menganggur sebagian besar justru kelompok terdidik, lantas seperti apa kondisi pekerja Indonesia saat ini?



Penciptaan kerja formal lambat:
Tenaga kerja formal tumbuh 0,8 persen, informal 3,2 persen sepanjang tahun 2021-2025.



Informalitas timpang:
Di Desa sebanyak 70,2 persen bekerja disektor informal, sedangkan perkotaan sebesar 49,4 persen.

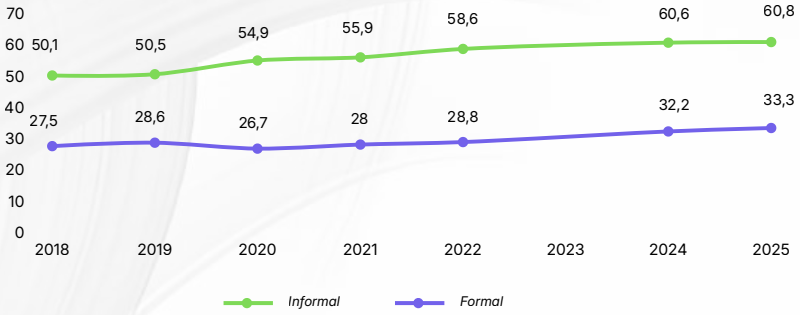


Pekerja 30 tahun ke atas:
60,8 juta bekerja informal pada 2025, dan 33,3 juta formal.

Pekerja usia 30 tahun ke atas menurut status Pekerjaan

(Juta Orang)

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, diolah CORE Indonesia



Gambar ini memperlihatkan sisi kedua persoalan.

Pekerja usia 30 tahun ke atas kian bertumpu pada sektor informal, dan jaraknya melebar sejak 2020.

Perlu dibaca pelebaran jarak setelah tahun 2020, yang menunjukkan pekerja mid-career yang kehilangan pekerjaan formal cenderung kembali masuk melalui pintu informal.

Kondisi ketenagakerjaan yang menunjukkan pola masuk susah dan bertahan susah ini terlihat pada kelompok berikut:



Lulusan baru:
Bersaing memperebutkan lowongan formal terbatas.



Pekerja mid-career dan korban PHK:
sulit kembali ke sektor formal.



Pekerja desa dan perempuan:
paling banyak tertahan di informalitas.



Pekerja gig dan kontrak:
minim jaminan sosial.



Perusahaan:
menanggung biaya rekrutmen berulang.

Rumusan Masalah

Dari peta dampak tersebut, persoalan intinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana membangun pasar kerja yang menyerap lulusan baru sekaligus menjaga pekerja *mid-career* bertahan, ketika pekerjaan formal tumbuh jauh lebih lambat daripada informal?

Dari Siap Kerja Menuju Pasar Kerja yang Menyerap

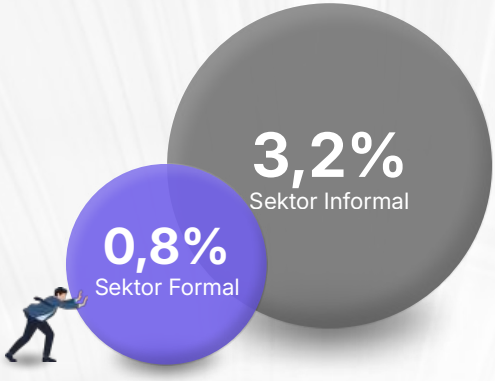
Solusi perlu bergeser dari menuntut kesiapan individu ke pembenahan jalur transisi, perlindungan kerja, dan penciptaan pekerjaan formal.

- **Benahi transisi dari pendidikan ke kerja:** memperluas magang berkualitas, memperkuat transparansi rekrutmen, dan memastikan pengalaman kerja menjadi jembatan menuju pekerjaan tetap.
- **Lindungi pekerja nonformal:** pekerja gig, freelance, dan kontrak jangka pendek tetap memperoleh jaminan sosial, perlindungan pendapatan, dan peluang pengembangan karier.
- **Rancang ulang reskilling:** pelatihan diarahkan pada pekerjaan yang tersedia, dengan ukuran keberhasilan penyerapan kerja, bukan jumlah sertifikat.
- **Perluas penciptaan kerja formal:** industrialisasi berbasis ekspor, penguatan industri menengah padat karya, serta optimalisasi jasa berorientasi permintaan global.
- **Peran aktor:** pemerintah menata regulasi dan pengawasan, dunia usaha membuka jalur masuk yang adil, serta lembaga pendidikan menyelaraskan kurikulum.

Pertumbuhan Rata-rata tenaga Kerja dalam empat tahun terakhir

(%)

Sumber: World Bank dan BPS, diolah CORE Indonesia



Gambar ini menegaskan akar persoalannya.

Lingkaran kerja informal tumbuh empat kali lipat sektor formal, sehingga tanpa penciptaan pekerjaan formal, pembenahan sisi pekerja tidak akan cukup.

Grafik ini sebaiknya dibaca bersama Gambar 1, sebab penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagian dijelaskan oleh penyerapan ke sektor informal, bukan oleh bertambahnya pekerjaan formal yang layak.

Dari seluruh temuan tersebut, benang merahnya dapat dirangkum sebagai berikut

Kesimpulan

Persoalan pasar kerja Indonesia tidak semata terletak pada kurangnya kesiapan individu. Besarnya pengangguran di kalangan lulusan pendidikan menengah dan tinggi, sulitnya akses ke pekerjaan formal, serta meluasnya pekerjaan yang tidak pasti menunjukkan kesenjangan antara sistem pendidikan, kebutuhan industri, dan kapasitas penciptaan kerja. Fenomena masuk susah dan bertahan susah tidak cukup dijelaskan melalui etos kerja generasi muda, karena yang tampak adalah pasar kerja yang belum menyediakan jalur masuk yang adil, pekerjaan layak, dan kepastian karier. Karena itu, solusi perlu bergerak dari mendorong individu agar semakin siap kerja menuju pembenahan ekosistem ketenagakerjaan secara menyeluruh, mulai dari magang berkualitas, rekrutmen transparan, reskilling yang terhubung dengan kebutuhan industri, hingga perlindungan sosial bagi pekerja nonformal dan kontrak. Ukuran keberhasilannya pun perlu bergeser ke seberapa mudah seseorang memperoleh pekerjaan layak dan bertahan di dalamnya.

Rekomendasi

- **Kawal implementasi perlindungan pekerja platform dan kontrak jangka pendek:**
  regulasi baru diikuti pengawasan konsisten agar hak atas pendapatan layak dan jaminan sosial benar-benar dirasakan pekerja.
- **Ubah ukuran keberhasilan program magang dan pelatihan:**
  Kartu Prakerja, Magang Hub, dan program sejenis dinilai dari penyerapan kerja setelah program, bukan dari jumlah peserta dan sertifikat.
- **Perkuat pengawasan magang dan rekrutmen:**
  awasi praktik magang menyimpang, pungutan tidak wajar, dan rekrutmen berbasis koneksi, serta sediakan kanal pengaduan yang mudah diakses.
- **Integrasikan kurikulum dengan kebutuhan industri secara berkala:**
  kerja sama kampus dan industri menghasilkan pembaruan kurikulum dan jalur penyerapan kerja, bukan formalitas administratif.
- **Tempatkan evaluasi diri secara proporsional:**
  keterampilan dan perencanaan karier tetap penting, tetapi tanggung jawab individu dibedakan dari hambatan struktural di luar kendali pencari kerja.

KOLABORATOR RUANG GAGASAN EDISI JUNI 2026

Bersama Membaca Pasar Kerja Anak Muda

Ruang Gagasan edisi Juni 2026, **"Potret Pasar Kerja Indonesia bagi Lulusan Baru dan Pekerja *Mid-Career*"**, menghadirkan suara anak muda yang sedang mengalami sendiri sulitnya masuk dan bertahan di dunia kerja. Cerita dan data dari teman-teman komunitas membuat pembahasan itu terasa dekat dengan kenyataan. Terima kasih atas kontribusi dan kerja samanya dalam menyuarakan hak anak muda atas pekerjaan yang layak.

Mitra Komunitas:

Youth Ranger Indonesia

Generasi Energi Bersih

SRE UPN "Veteran" Jakarta

Bagian 4

Anak Muda Bersuara

Menyuarakan Gagasan Anak Muda Melalui Komunitas

Halo Sobat Ruang Gagasan, kalau kamu ingin membawa perubahan, media apa yang biasa kalian gunakan untuk menyalurkannya?

Edisi Community Development, berupaya merefleksikan bersama peserta tentang perjalanan Ruang Gagasan sekaligus menjaring masukan, kritik, dan usulan rekomendasi dan isu krusial yang perlu dibahas hingga akhir 2026.

Pada edisi kali ini, Ruang Gagasan membuka ruang partisipatif bagi peserta yang merupakan anak-anak muda lintas kalangan dan lintas profesi untuk aktif terlibat membangun arah program dan menjaring serta menentukan isu krusial untuk dibahas agar suara anak muda dapat di suarakan sebagai bentuk rekomendasi yang membangun Indonesia melalui gerakan kolaborasi lintas komunitas.

Gedung CORE Indonesia
Cafe Tenku Lt.4
Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.76A, Jakarta Selatan, Indonesia







Pemantik Acara:
Fitri Yana
Huzni Mubarok
Muh Afdhal Mubarak AS
Peneliti CORE Indonesia



Pemaparan data oleh pemantik, dilanjutkan diskusi interaktif dengan peserta

3 Tahun Menghimpun Gagasan

Ruang Gagasan lahir dari rangkaian Youth Economic Summit 2023 dan mulai berjalan sebagai forum rutin bulanan hingga 2026. Setelah perjalanan tiga tahun, lebih dari 20 forum diskusi telah digelar. Diantaranya:


Bonus Demografi


Ekonomi Gig


Wirausaha Muda


Darurat Sampah


Transisi Energi


Zero Emission

Ruang Gagasan juga turun langsung ke lapangan, termasuk mengunjungi TPST di Banyumas, berdiskusi di Universitas Jenderal Soedirman, serta berdiskusi di RT 08 RW 04 Malaka Jaya sebagai RT percontohan ekonomi sirkular di Indonesia.





__Ruang Gagasan__ berkunjung ke TPST Kedungrangu __Banyumas__

Selama perjalanan tiga tahun Ruang Gagasan

Himpunan rekomendasi disuarakan dalam bentuk buku yang diserahkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Youth Economic Summit 2024 dan kepada Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan dalam Youth Economic Summit 2025. Memasuki 2026, suara gagasan ini juga dikuatkan melalui ruang opini bagi publik dan kolaborasi yang lebih luas dengan komunitas anak muda.

Komunitas Sebagai Saluran Kepedulian Anak Muda

Lebih dari 500 anak muda telah hadir di forum Ruang Gagasan sejak 2024 dan menyuarakan gagasan-gagasan mereka untuk Indonesia. Anak muda merupakan kalangan idealis yang akan berperan memimpin Indonesia di masa depan.

Jumlah pemuda Indonesia mencapai **64,22** **juta jiwa pada 2024 atau sekitar seperlima penduduk**

(BPS, 2025).

Kepedulian mereka terhadap berbagai isu krusial di dalam negeri sebetulnya tinggi. Semakin marak media sosial, semakin terlihat masifnya kepedulian mereka, tetapi saluran yang bisa dipercaya untuk menampungnya masih sempit. Saluran politik formal kerap terasa elitis dan jauh dari keseharian, sementara media sosial lebih sering menjadi tempat respons sesaat.

Oleh karena itu, kehadiran komunitas menjadi ruang diskusi dan aspirasi anak muda agar suaranya dapat didengar.

Pengembangan Komunitas Sebagai Penjaring Suara Anak Muda

Komunitas kepemudaan sebenarnya hadir dalam banyak bentuk. Komunitas advokasi mendorong isu tertentu langsung ke pembuat kebijakan, tetapi kerap terasa terlalu serius bagi pemula. Forum insidental yang digagas pemerintah daerah biasanya muncul setahun sekali sehingga sulit menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis, sedangkan komunitas sosial terasa nyaman tetapi jarang meninggalkan bekal selain pertemanan.

Kondisi ini paling dirasakan anak muda yang baru ingin terlibat, karena mereka mudah berhenti menjadi penonton ketika ruang yang ada terasa menakutkan atau tidak memberi apa-apa. Peserta yang setia hadir juga membutuhkan ruang untuk tumbuh, misalnya menjadi penulis atau fasilitator. Pembuat kebijakan pun berpotensi kehilangan masukan dari bawah ketika suara anak muda tidak terhimpun dengan baik

Dengan demikian komunitas perlu mengembangkan caranya dalam menghimpun suara anak muda.

Ruang Gagasan hadir sebagai ruang suara mereka, dan di tahun ketiga perjalanannya ingin menguatkan peran tersebut melalui kolaborasi lintas komunitas, agar suara lintas disiplin, lintas profesi, dan lintas aksi dapat dihimpun melalui gerakan bersama.

Rumusan Masalah

Persoalan yang perlu dijawab adalah bagaimana kepedulian anak muda yang tersebar dapat dihimpun melalui komunitas hingga sampai ke pembuat kebijakan, serta peran apa yang perlu diambil pemerintah, pemangku kepentingan, dan anak muda sendiri agar saluran tersebut bekerja.

Komunitas sebagai Jembatan Suara Anak Muda

Agar kepedulian anak muda tidak berhenti di linimasa media sosial, Ruang Gagasan perlu dirancang sebagai saluran yang dipercaya dan mampu mengantarkan gagasan hingga ke pembuat kebijakan. Refleksi tiga tahun Ruang Gagasan memetakan tiga hal yang membuat saluran itu bekerja.

- Pertama, diskusi berpijak pada data dan pengetahuan melalui kemitraan dengan lembaga riset, kampus, dan komunitas lain, sehingga gagasan anak muda punya dasar yang kuat saat dibaca pembuat kebijakan.
- Kedua, pintu masuknya ramah bagi siapa pun, dengan pembahasan yang berangkat dari persoalan sehari-hari dan format yang setara, sehingga anak muda tidak perlu merasa ahli lebih dulu untuk ikut bicara.
- Ketiga, ada jembatan yang jelas menuju ruang kebijakan, mulai dari rekomendasi yang dihimpun dan dibukukan, tulisan opini yang dipublikasikan, hingga forum yang mempertemukan anak muda dengan pengambil keputusan.

Kesimpulan

Kepedulian anak muda Indonesia terhadap persoalan bangsa sudah terlihat jelas, dari ramainya percakapan di media sosial hingga lebih dari 500 anak muda yang hadir di forum Ruang Gagasan selama tiga tahun. Dukungan yang diperlukan adalah hadirnya saluran yang dipercaya untuk menampung kepedulian itu dan mengantarkannya ke ruang kebijakan. Komunitas dapat mengisi celah tersebut selama ia berpijak pada data, terbuka bagi pemula, dan terhubung dengan pengambil keputusan, seperti ketika himpunan rekomendasi anak muda sampai ke tangan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Asisten Khusus Presiden.

Bagi pemerintah, forum komunitas yang hidup adalah sumber masukan yang jujur tentang apa yang dirasakan generasi penerusnya. Bagi kampus, lembaga riset, dan dunia usaha, ruang seperti ini layak didukung karena di sanalah gagasan diuji sebelum menjadi kebijakan. Bagi anak muda sendiri, bergabung dengan community development dari Ruang Gagasan adalah langkah paling dekat untuk mulai bersuara, sebab suara yang datang bersama-sama jauh lebih sulit untuk diabaikan.

Rekomendasi

Pemangku kebijakan perlu mengubah forum pemuda yang selama ini bersifat insidental menjadi forum rutin, setidaknya setiap triwulan, yang digelar bersama komunitas kepemudaan setempat. Rekomendasi dari forum tersebut perlu diterima sebagai masukan resmi dalam penyusunan rencana pembangunan, disertai tanggapan tertulis agar anak muda mengetahui gagasan mana yang ditindaklanjuti. Kampus, lembaga riset, dunia usaha, dan media dapat memfasilitasi komunitas anak muda dengan menyediakan ruang diskusi, data, narasumber, dan kanal publikasi bagi opini terpilih.

Komunitas kepemudaan perlu memperluas kolaborasi lintas komunitas melalui kalender diskusi bersama dan pembahasan yang memadukan data dengan format ramah pemula, sekaligus membuka jalur bagi anggotanya untuk menjadi penulis dan fasilitator. Anak muda sendiri dapat memulai dari langkah yang paling dekat, yaitu hadir di forum komunitas, menulis gagasan berbasis data, dan bergabung dengan gerakan lintas isu agar suaranya terhimpun dan sampai ke pembuat kebijakan.

KOLABORATOR RUANG GAGASAN EDISI JULI 2026

Terima Kasih telah Tumbuh Bersama

Untuk pertama kalinya, teman-teman komunitas ikut menentukan arah Ruang Gagasan melalui edisi Juli 2026, **“Ngobrol Bareng tentang Komunitas Anak Muda dan Masa Depannya”**. Masukan, kritik, dan usulan isu yang disampaikan kini menjadi pegangan Ruang Gagasan untuk melangkah ke tahun berikutnya. Terima kasih atas kontribusi dan kerja samanya dalam merawat ruang ini bersama-sama.

Mitra Komunitas:

Youth Ranger Indonesia

Jaringan Komunitas Partisipan:

Bagian 5

81 Tahun Kemerdekaan Indonesia

Sebuah Refleksi Kebijakan Sosial-Ekonomi

Halo Sobat Ruang Gagasan, di usia Indonesia yang ke-81 tahun, menurutmu sudah seberapa sejahtera masyarakat kita?

Menjelang 81 tahun merdeka, masyarakat dan banyak anak muda justru merasa makin rentan. Pekerja informal terus bertambah, angka kemiskinan resmi terlihat rendah padahal biaya hidup makin berat, dan kebijakan besar kerap diputuskan tanpa mendengar mereka yang terdampak. Forum ini dibuat sebagai refleksi kemerdekaan Indonesia, serta membaca kebijakan dari sudut pandang masyarakat dan pakar.

Format Acara

Refleksi kebijakan sosial-ekonomi menjelang HUT ke-81 RI, membedah kemiskinan struktural, minimnya partisipasi publik dalam kebijakan, dan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan prinsip gotong royong.

Gedung CORE Indonesia
CORESight Hub Lt. 1
Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.76A, Jakarta Selatan, Indonesia







Pemaparan data oleh pemantik, dilanjutkan diskusi interaktif dengan peserta

Pemantik Acara:

Pierre Bernardo B
Head of Social Development
The Prakarsa

Susi Haryanti
Direktur Utama Koperasi
Indonesia Baru

M. Akhtar Jabbaran
External Engagement
Associate Bijak Memantau

Dipo Satria Ramli
Ekonom CORE Indonesia

81 Tahun Merdeka, Kerentanan Tak Banyak Bergeser

Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, namun berbagai tantangan sosial-ekonomi masih membayangi kehidupan sebagian besar warganya. Forum Ruang Gagasan edisi Agustus 2026 menyingkap tantangan tersebut melalui refleksi atas kebijakan sosial-ekonomi yang berjalan selama ini. Struktur ekonomi nasional telah mengalami berbagai perubahan melalui berbagai kebijakan yang diambil, namun kelas menengah kian terjepit di antara kenaikan biaya hidup dan terbatasnya perlindungan sosial.

Dua Potret Kemiskinan di Indonesia

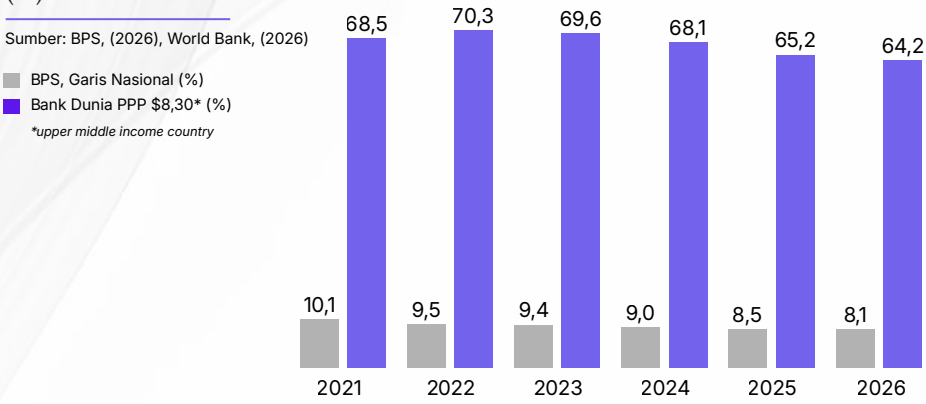
Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen dengan garis kemiskinan Rp669.235 per kapita per bulan (BPS, 2026), atau setara sekitar Rp22 ribu per hari.

Apabila diukur dengan standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas, proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan melonjak menjadi 65,2 persen di tahun 2025 dan di proyeksikan 64,2 persen di 2026 (World Bank, 2026). Selisih yang lebar ini menandakan besarnya kelompok warga yang tidak tergolong miskin secara statistik, tetapi hidup sangat dekat dengan garis tersebut. Kemiskinan pada dasarnya merupakan dampak dari kebijakan. Anggaran perlindungan sosial tahun 2026 telah mencapai Rp508,2 triliun (Kementrian Keuangan, 2025), namun bantuan sosial belum menyentuh faktor yang membuat seseorang jatuh miskin, seperti sakit berkepanjangan, sanitasi yang buruk, dan biaya pendidikan anak.

Dua Potret Kemiskinan Indonesia Garis Kemiskinan Nasional dan Garis Bank Dunia

(%)

Sumber: BPS, (2026), World Bank, (2026)

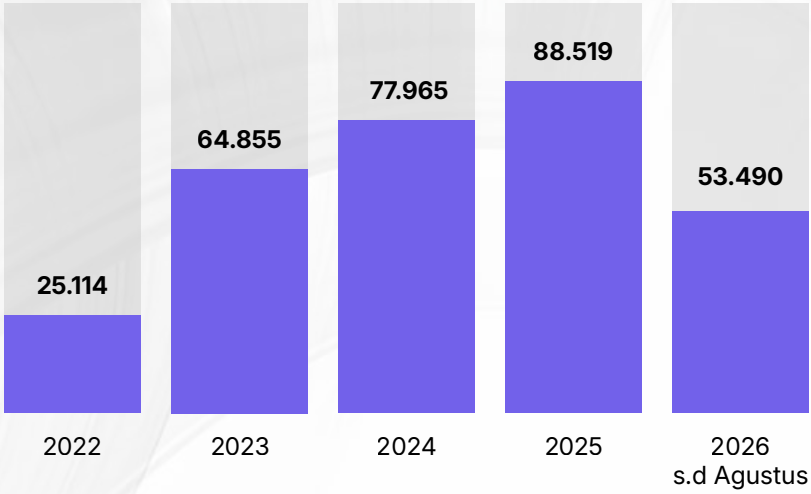


Kerja Ada, Namun Kepastian Tidak

Persoalan serupa tampak di pasar kerja. Pada Februari 2026, jumlah pekerja informal mencapai 87,74 juta orang atau 59,42 persen dari total penduduk bekerja (BPS, 2026).

Tingkat pengangguran terbuka yang hanya 4,68 persen belum mencerminkan kualitas pekerjaan yang tersedia, sebab banyak warga bekerja semata untuk bertahan hidup tanpa penghasilan tetap maupun jaminan sosial. Sebagian besar pengemudi ojek daring belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan banyak di antara mereka merupakan korban pemutusan hubungan kerja akibat deindustrialisasi dini. Pencari kerja muda pun menghadapi praktik magang yang terus didaur ulang serta maraknya lowongan fiktif yang menguras tabungan mereka.

Jumlah Tenaga Kerja Ter-PHK per Tahun, Nasional (Orang)



Grafik 2
Sumber: Kemnaker, (2026)

“Kebijakan sosial-ekonomi perlu menjawab akar kerentanan masyarakat dan memberi tempat bagi suara mereka, sementara pendekatan yang berjalan saat ini masih bertumpu pada bantuan sosial dan program yang dirancang dari atas dan belum mengarah pada persoalan inti masyarakat.”

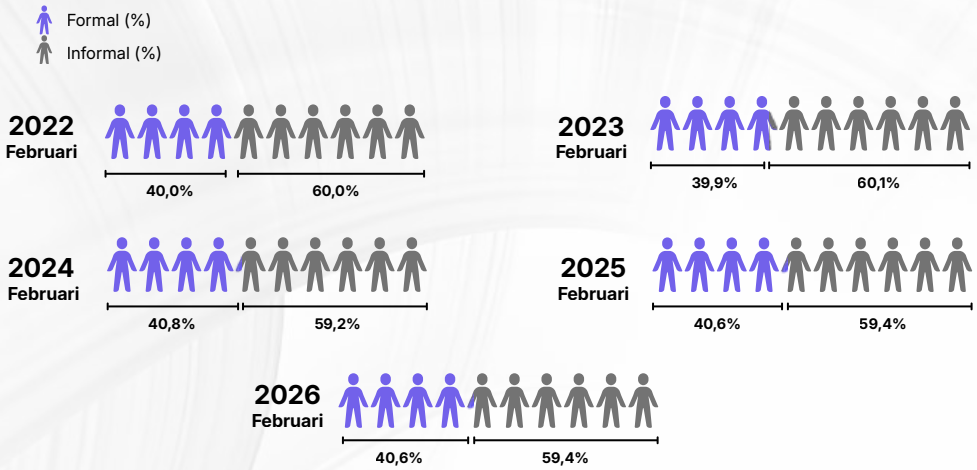
Pihak Paling Terdampak

Beban terberat dari kondisi ini dipikul oleh tiga kelompok. ***Pekerja informal dan mitra platform*** menanggung sendiri risiko sakit, kecelakaan, dan hari tua. ***Pencari kerja muda*** terjebak dalam siklus magang berulang dan rawan menjadi korban penipuan lowongan. ***Kelas menengah bawah*** tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial meski sangat rentan terhadap guncangan, padahal mereka adalah kelas dengan jumlah orang terbanyak dalam tingkatan kelas ekonomi masyarakat Indonesia.

Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal dan Informal

(%)

Sumber: BPS, diolah (2026)



Rumusan Masalah

Kebijakan sosial-ekonomi perlu menjawab akar kerentanan masyarakat dan memberi tempat bagi suara mereka, sementara pendekatan yang berjalan saat ini masih bertumpu pada bantuan sosial dan program yang dirancang dari atas dan belum mengarah pada persoalan inti masyarakat.

Menjawab Akar Kerentanan

Kajian mengenai kemiskinan di Indonesia sudah sangat banyak, tetapi kebijakan yang lahir darinya cenderung hanya menjawab gejala. Pertanyaan kunci yang diangkat dalam forum ini adalah apakah kebijakan selama ini telah menjawab persoalan yang tepat. Dari refleksi tersebut, forum memetakan tiga arah solusi yang dapat dijalankan dengan memperkuat program yang sudah ada.

- ***Pertama,* membaca kemiskinan secara lebih utuh.** Angka kemiskinan resmi tetap menjadi acuan, tetapi perlu dilengkapi data kelompok rentan miskin melalui pemutakhiran berkala Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), disertai upaya mengaitkan bantuan sosial dengan akses layanan kesehatan dan pendidikan.

- ***Kedua,* memperluas perlindungan bagi pekerja informal dan pencari kerja, baik melalui jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjangkau mitra platform maupun pengawasan pemagangan agar kembali berfungsi sebagai pelatihan kerja (Permenaker, 2020).** Arah ketiga adalah membuka ruang partisipasi warga, mulai dari forum musyawarah yang mempertemukan warga dengan pembuat kebijakan.

- ***Ketiga,* arah tersebut menuntut kerja bersama.** Pemerintah pusat dan daerah memegang kendali atas kebijakan dan data, dunia usaha serta platform digital membuka jalan menuju kerja layak, sedangkan komunitas dan anak muda memastikan suara masyarakat tetap terdengar.

Kesimpulan

Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, kerentanan warga masih banyak lahir dari pilihan kebijakan. Angka kemiskinan resmi terus menurun, tetapi garis kemiskinan yang digunakan terlalu rendah untuk menangkap beratnya kehidupan kelas menengah bawah. Lapangan kerja memang bertambah, namun sebagian besar tumbuh di sektor informal yang tidak memberikan kepastian. Akibatnya, risiko sakit, kehilangan pekerjaan, dan hari tua ditanggung sendiri oleh pekerja, kondisi yang dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai eksternalisasi risiko.

Refleksi dalam forum ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki beragam jalan untuk mendorong perubahan, baik dengan bersuara melalui karya dan data, masuk ke dalam sistem, maupun membangun koperasi berasaskan gotong royong. Suara yang tercerai-berai mudah diabaikan, sedangkan masyarakat yang berhimpun menjadi gerakan akan lebih diperhitungkan. Kemerdekaan yang layak dirayakan adalah kemerdekaan yang benar-benar sampai ke dompet dan dapur warga.



Rekomendasi

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial perlu melengkapi rilis kemiskinan dengan data penduduk rentan miskin serta memutakhirkan DTSEN secara berkala, dimulai pada rilis kemiskinan berikutnya, sehingga bantuan sosial dapat menjangkau kelompok yang selama ini luput dan terhubung dengan layanan kesehatan serta pendidikan.

Pada 2027

Kementerian Ketenagakerjaan perlu merevisi aturan pemagangan dengan membatasi pengulangan peserta dan mewajibkan konversi sebagian pemagang menjadi karyawan, lalu bersama platform lowongan kerja memverifikasi pemberi kerja dan menurunkan lowongan fiktif.

BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah perlu memperluas kepesertaan pekerja informal dan mitra platform melalui skema iuran yang terjangkau, dengan target cakupan yang naik bertahap setiap tahun. Kementerian Koperasi perlu memberi ruang bagi koperasi yang tumbuh dari inisiatif anggotanya melalui pendampingan tata kelola. Kementerian dan pemerintah daerah juga perlu menggelar konsultasi publik sebelum kebijakan strategis diterapkan agar warga terdampak ikut menentukan arah kebijakan.

KOLABORATOR RUANG GAGASAN EDISI AGUSTUS 2026

Bersama Merefleksikan 81 Tahun Merdeka

Menjelang 81 tahun kemerdekaan, Ruang Gagasan edisi Agustus 2026, **“81 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Sebuah Refleksi Kebijakan Sosial-Ekonomi”**, mengajak peserta membaca kembali kebijakan sosial-ekonomi bersama komunitas dan yayasan yang bergerak di isu kemiskinan, partisipasi publik, dan koperasi. Terima kasih atas kontribusi dan kerja samanya dalam refleksi ini, yang menjadi bekal bagi anak muda untuk ikut memastikan kemerdekaan benar-benar sampai ke dapur warga.

Mitra Komunitas:

Bagian 6

Inovasi Besar Dari Pemerintahan Terkecil

Belajar dari RT 08/RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur

Halo Sobat Ruang Gagasan, pernahkah kalian berpikir bahwa inovasi dari satu RT dapat diakui di kancah global?

Kunjungan ini dilakukan untuk belajar langsung bagaimana prinsip ekonomi sirkular dapat berjalan di lingkungan kota yang padat dan sempit, sekaligus menggali cara kerja yang dapat ditiru kampung-kampung lain.

Format Acara

Ruang Gagasan edisi September 2026 berkesempatan mengunjungi RT 08/RW 04 Malaka Jaya, sebuah RT dengan banyak inovasi, mulai dari mengubah saluran air menjadi kolam lele, mengolah sampahnya sendiri baik organik dan anorganik, dan menanam tanaman di gang. Peserta berdialog dengan Ketua RT Bapak Taufiq Supriadi dan pengurus warga, lalu melihat langsung praktik ekonomi sirkular berbasis warga.

Gang 8
RT 08/RW 04
Jalan Nusa Indah IV, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.







Pemantik Acara:
Taufiq Supriadi
Ketua RT 08/RW 04 Malaka Jaya



Pemaparan data oleh pemantik, dilanjutkan diskusi interaktif dengan peserta

Inovasi Lokal di Tengah Beban Krisis Sampah Nasional

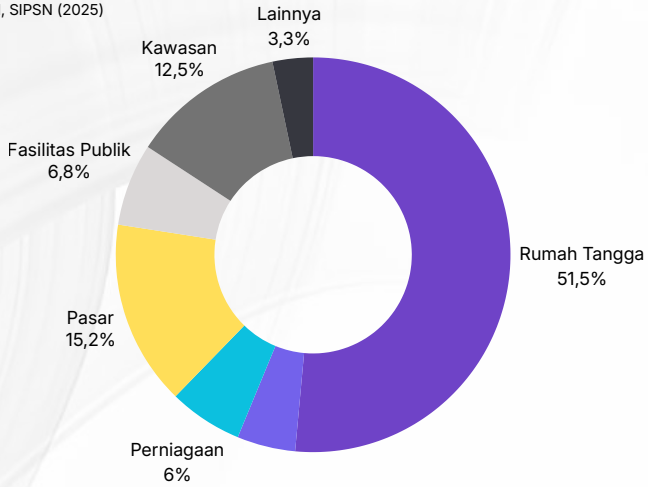
Sepanjang 2025, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat timbulan sampah sebesar 34,7 juta ton dari 303 kabupaten dan kota, dengan sisa makanan sebagai komposisi terbesar, yaitu 40,45 persen (SIPSN, 2025).

Sebanyak 51,45 persen sampah itu berasal dari rumah tangga, dan data SIPSN 2025 menunjukkan sekitar dua pertiga sampah nasional belum terkelola (SIPSN, 2025). Penanganannya selama ini bertumpu di hilir, yaitu diangkut lalu dibuang ke TPA, sementara Kementerian Lingkungan Hidup telah menutup 343 TPA yang masih memakai sistem pembuangan terbuka.

Komposisi Sampah Nasional Berdasarkan Sumber, 2025

(%)

Sumber:KLH/BPLH, SIPSN (2025)





RT 08 Malaka Jaya: Lahan Sempit, Inovasi Tetap Tumbuh

Tekanan itu terasa paling berat di kota padat. Di kampung yang dipenuhi beton, warga hidup berdampingan dengan air sumur yang keruh, udara yang makin panas, dan sampah yang menunggu diangkut.

Menghadapi kondisi serupa dengan gang selebar sekitar dua meter dan nyaris tanpa lahan terbuka . Sejak Taufiq Supriadi terpilih sebagai ketua RT pada Oktober 2023, warga membangun sekitar 40 program lingkungan yang sebagian besar rampung dalam 70 hari pertama. Saluran beton disulap menjadi kolam lele bertingkat tanpa menghambat aliran air. Sampah organik diolah menjadi kompos dan maggot, maggot menjadi pakan lele, sisa makanan menjadi pakan ayam petelur, dan alas kandangnya kembali menjadi kompos untuk tanaman di sela rumah.

Hasil panen kolam gizi dibagikan gratis kepada balita, ibu hamil, dan lansia, sementara ibu-ibu setempat mengolah lele menjadi produk UMKM yang menyumbang 10 persen labanya ke kas RT. Inisiatif inilah yang membuat RT ini dikenal di dalam negeri hingga mancanegara, termasuk diliput televisi Tiongkok dan dikunjungi delegasi dari sepuluh negara.

Praktik di tingkat RT ini menjadi bukti bahwa keterbatasan ruang tidak menghalangi lahirnya gagasan baru, dan inovasi dapat tumbuh di mana pun, termasuk di gang sempit. Penerapan ekonomi sirkular di Malaka Jaya juga membawa dampak positif bagi warga, terutama perubahan perilaku yang membuat sampah dipandang sebagai peluang ekonomi

Rumusan Masalah

Persoalan sampah yang dihadapi RT 08 Malaka Jaya juga dirasakan secara lebih luas di banyak daerah lain, sementara separuh lebih sampah nasional berasal dari rumah tangga. Persoalan yang perlu dijawab adalah bagaimana praktik ekonomi sirkular di tingkat RT ini dapat direplikasi di daerah lain dan diperluas ke tata kelola pemerintahan yang lebih besar, sehingga ikut menjawab persoalan sampah nasional.

Solusi yang Dipetakan: Dari Satu Gang ke Banyak Daerah Lainnya

Kunjungan ke RT 08 Malaka Jaya memperlihatkan empat bahan yang membuat ekonomi sirkular terutama di tingkat RT bekerja. Pertama, perencanaan berbasis data yang menyambung persoalan air, sampah, pangan, dan energi dalam satu siklus tertutup, sehingga keluaran satu kegiatan menjadi masukan bagi kegiatan lain. Kedua, warga diposisikan sebagai pemilik melalui pembagian kerja dan pembagian hasil yang jelas, mulai dari kelompok pembudi daya dan pemilik rumah di lokasi kolam hingga kas RT dan RW. Ketiga, keuangan yang terbuka membangun kepercayaan pihak lain untuk ikut mendanai. Keempat, prosedur operasi baku untuk pengelolaan sampah hingga peralihan kepemimpinan disiapkan agar program tetap berjalan ketika pengurus berganti.

Agar keempat bahan itu menyebar ke luar gang, perlu jalur replikasi yang melibatkan banyak pihak. Pemerintah dapat menautkannya dengan program yang sudah ada, seperti Program Kampung Iklim yang menyasar tingkat RW dan RT (KLH, 2025), serta kebijakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber seperti yang mulai diterapkan di Jakarta. Dunia usaha dan lembaga filantropi menyediakan pendanaan yang terarah, kampus memberi pendampingan teknis, sedangkan komunitas dan anak muda membantu mendokumentasikan dan menyebarkan praktiknya.



“Ini bukti bahwa lingkungan kecil pun bisa berkontribusi pada ketahanan pangan, lapangan kerja, dan SDGs.”

Taufiq Supriadi
Ketua RT 08/RW 04 Malaka Jaya

Kesimpulan

RT 08 Malaka Jaya menunjukkan bahwa prinsip itu dapat dimulai dari gang selebar dua meter, ketika sampah dapur menjadi pakan, saluran air menjadi kolam, dan hasil panen kembali ke meja warga yang paling membutuhkan.

Karena separuh lebih sampah nasional lahir dari rumah tangga, RT dan RW sesungguhnya berada di garis depan pengelolaan sampah.

Keberhasilan satu gang dapat menjadi pijakan bagi perubahan yang jauh lebih luas. Pelajaran terpenting dari RT 08 Malaka Jaya terletak pada cara kerjanya, yaitu perencanaan berbasis data, warga sebagai pemilik, keuangan yang terbuka, dan prosedur yang menjamin kelanjutan. Ketika cara kerja ini diadopsi oleh lebih banyak RT dan RW, lalu didukung kebijakan di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, pengurangan sampah dari sumber dapat tumbuh dari bawah dan melahirkan lebih banyak Malaka Jaya di berbagai daerah.

Rekomendasi

Kementerian Lingkungan Hidup perlu

Menjadikan cara kerja RT 08 Malaka Jaya sebagai model rujukan pengurangan sampah dari lingkup terdekat RT dan RW, dengan mengintegrasikannya ke Program Kampung Iklim dan menyusun pedoman replikasi yang dapat dipakai pemerintah daerah mulai 2027.

Kementerian Dalam Negeri dapat mendorong pemerintah daerah memasukkan pengelolaan sampah berbasis lingkungan ke dalam rencana kerja kelurahan dan desa, sehingga anggaran kelurahan dan dana desa dapat diarahkan untuk sarana dasar seperti:

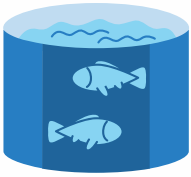
Komposter



Biopori



Kolam budi daya



Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memulai dengan satu RW percontohan di setiap kecamatan, disertai pendampingan dari dinas lingkungan hidup dan dinas ketahanan pangan, dengan pengurangan sampah yang masuk ke TPA sebagai ukuran keberhasilan. Dunia usaha dan lembaga zakat dapat menyalurkan dana tanggung jawab sosial melalui skema bersama yang mensyaratkan laporan keuangan terbuka, kampus dapat mendampingi uji kualitas dan pengukuran dampak, sementara komunitas dan anak muda dapat menjadi relawan dan penyebar praktik baik, seperti peserta Ruang Gagasan yang mendokumentasikan hasil kunjungan ini dalam bentuk tulisan.

KOLABORATOR RUANG GAGASAN EDISI SEPTEMBAER 2026

Belajar dari Gang Malaka Jaya

Di RT 08/RW 04 Malaka Jaya menjadi ruang belajar bagi peserta Ruang Gagasan edisi September 2026, **“Inovasi Besar dari Pemerintahan Terkecil”**. Terima kasih kepada Ketua RT, pengurus, warga, dan teman-teman komunitas atas kontribusi dan kerja samanya, sehingga peserta dapat melihat langsung bagaimana sampah, air, dan pangan dikelola dalam satu siklus.

Mitra Penyelenggara:

Mitra Komunitas:

Hai, teman-teman muda yang sudah membaca sampai halaman terakhir.

Rekomendasi di setiap bagian buku ini masih perlu dikawal setelah bukunya selesai dibaca. Sebagian menyangkut keputusan pemerintah, sebagian lagi bisa dimulai anak muda dari lingkungan terdekatnya, dan semuanya perlu terus diuji seiring perubahan yang terjadi di lapangan.

Dalam tiga tahun, Ruang Gagasan tumbuh dari forum diskusi bulanan menjadi ruang yang mempertemukan anak muda lintas latar belakang, di Jakarta maupun di daerah lain seperti Banyumas. Himpunan rekomendasinya sudah sampai ke tangan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 2024 dan Asisten Khusus Presiden pada 2025. Perjalanan itu menunjukkan bahwa suara anak muda bisa sampai ke meja pengambil kebijakan selama ada yang terus menghimpun dan mengantarkannya.

Ke depan, edisi berikutnya diharapkan lahir langsung dari tangan teman-teman komunitas, dengan Ruang Gagasan sebagai pendamping. Komunitas, kampus, lembaga, maupun dunia usaha yang ingin berkolaborasi bisa menghubungi Ruang Gagasan melalui kontak di halaman belakang buku ini.

Sampai ketemu di Ruang Gagasan 2027!



BACA EDISI SEBELUMNYA

Buku ini merupakan kelanjutan dari perjalanan Ruang Gagasan sejak 2024. Pada 2024 dan 2025, Ruang Gagasan menghimpun pandangan anak muda tentang bonus demografi, ekonomi gig, transisi energi, darurat sampah, UMKM, hingga ekonomi berbasis budaya. Seluruh gagasan tersebut dirangkum dalam buku Suara-Suara Generasi Muda untuk Bangsa.

Suara-Suara Generasi Muda untuk Bangsa

Buku Ruang Gagasan Edisi 2024–2025

www.youtheconomicsummit.org

Tentang Buku

Buku ini menghimpun gagasan dan rekomendasi anak muda dari forum Ruang Gagasan sepanjang 2026. Setiap bab berangkat dari persoalan yang dekat dengan keseharian anak muda, mulai dari kerentanan pasokan energi, kebijakan pendidikan, dan pasar kerja bagi lulusan baru dan pekerja mid-career, hingga refleksi kebijakan sosial-ekonomi di usia 81 tahun kemerdekaan dan praktik ekonomi sirkular di tingkat RT. Persoalan tersebut dibahas bersama pemantik, peserta, dan komunitas kolaborator dengan bertumpu pada data, lalu dirumuskan menjadi rekomendasi bagi para pengambil kebijakan.

Ruang Gagasan merupakan forum diskusi rutin yang diselenggarakan CORE Indonesia sejak 2024 dan telah diikuti lebih dari 500 anak muda dari beragam latar belakang. Pada 2026, Ruang Gagasan berjalan bersama komunitas anak muda sebagai kolaborator, sehingga gagasan yang terhimpun datang dari lintas disiplin dan lintas profesi.

CORE INDONESIA
CENTER OF REFORM ON ECONOMICS

CORE Indonesia merupakan lembaga *think tank* independen yang berdiri sejak 2013, dengan fokus pada penelitian dan konsultasi di bidang ekonomi, industri, perdagangan, pembangunan daerah, dan kebijakan publik. Lembaga ini hadir sebagai mitra strategis bagi pembuat kebijakan, kalangan intelektual, dan pelaku bisnis dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi fundamental.

Sebagai wujud komitmen dalam mendorong partisipasi aktif generasi muda pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kami menyelenggarakan beragam kegiatan seperti diskusi tematik, bincang ekonomi daerah, pelatihan UKM muda, pembekalan birokrat muda, kuliah umum di kampus, hingga kunjungan lapangan bisnis. Komunike komunitas muda ini pun menjadi salah satu produk nyata dari rangkaian diskusi reguler tersebut.

core-indonesia.com
youtheconomicsummit.org
ruanggagasan.core / core_indonesia